

**FUNGSI BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN (BPTP) RIAU
DALAM PEMBINAAN USAHA TANI (Studi pada Petani Komoditas Tanaman
Padi Sawah di Kabupaten Rokan Hulu)**

VICKY HARAHAP

e-mail : vicky.hararap10@gmail.com

Dibimbing Oleh : DR. Febri Yuliani, S.Sos, M.Si
Program Studi Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Riau,
Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam Pekanbaru, 28293
Telp/ Fax : (0761) 63277

ABSTRACT

The research aims to identify and analyze the implementation of the functions Institute for Agricultural Technology (BPTP) in Riau Farmers Business Development, as well as supporting and inhibiting factors. Formulation of research problems are: (1) How does the implementation of the functions Institute for Agricultural Technology (BPTP) in Riau Farm Development on Commodity Crops Rice Farmers in Rokan Hulu? (2) What are the factors inhibiting and supporting the implementation of the functions Institute for Agricultural Technology (BPTP) in the Development of Farming Lists?

The method used is descriptive method with qualitative approach. The research location is in BPTP Riau, and for the purposes of completeness of the data then data collection is also done at Rice Farmers in Rokan Hulu. As respondents used research informants consisting of Riau BPTP Head, Research and Extension Field in the institution, as well as Chairman of Farmers Group. Types of data are primary and secondary data. The data collection technique Interviews, documentation and observation. Data obtained and analyzed by descriptive-qualitative.

This study concluded that: Function Assessment Institute for Agricultural Technology (BPTP) in Riau Farming Guidance has been done effectively. This is due to the establishment of clear objectives, scope of duties and responsibilities in accordance with the working ability as well as availability of human resources, delegation of authority and a clear division of labor and in accordance with their duties and functions, and the existence of good coordination of the tasks and subordinates. The inhibiting factors encountered in implementing coaching Riau BPTP farm through program assessment, assembly and development of appropriate agricultural technologies specific for Farmers, among others, are: (a) coordination and synchronization program with local government is less than optimal; (b) the presence of extreme climate change (droughts and floods); (c) the majority of farmer groups are less dynamic in a group activity; and (d) There is still limited availability of human resources in the Ministry of Agriculture. While supporting factor for BPTP Riau in implementing farming guidance through program assessment, assembly and development of appropriate agricultural technologies specific for the Farmers, among others, are: (a) technology introduced to farmers easy to implement, and in addition

the information technology easy obtained, profitable and can be applied in a wide expanse; (b) Participation of the farmers are relatively well enough to collaborate in the success of the program is implemented and accepted technology introduced; and (c) There is support for local government in expanding the application of the technology at the farm level.

Keywords: function, development, farming, agricultural technology

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi yang berlandaskan kemandirian dan berkeadilan dengan semangat ekonomi kerakyatan sangat penting di tengah-tengah era globalisasi di mana persaingan cenderung semakin kuat. Dalam kondisi ini sistem ekonomi yang dibangun hendaknya senantiasa mengutamakan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Rakyat perlu diberdayakan perekonomiannya untuk dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan dapat meningkatkan pendapatan serta kesejahteraannya. Untuk itu pembangunan perekonomian yang berbasis kerakyatan perlu dikembangkan antara lain melalui pengembangan berbagai bidang usaha rakyat.

Sebagai negara agraris dimana terdapat sumber daya alam yang melimpah serta potensi lahan pertanian yang menjanjikan, maka salah satu bidang usaha yang cocok untuk dikembangkan dalam rangka membangun ekonomi rakyat ialah bidang usaha tani. Terlebih lagi penduduk Indonesia yang sebagian besar berdiam di pedesaan yang masih terdapat lahan yang luas yang bisa diusahakan sebagai lahan pertanian, dan pada umumnya masih menggantungkan hidup dari hasil-hasil pertanian, maka pengembangan usaha tani terutama yang mengusahakan budidaya pertanian tanaman pangan, sangat memungkinkan

menjadi salah satu usaha di bidang agribisnis yang cukup potensial untuk dapat meningkatkan perekonomian rakyat yang mandiri sehingga pada akhirnya turut memperkuat swasembada serta ketahanan pangan.

Namun karena usaha tani yang dikelola masyarakat, terutama yang berada di pedesaan masih banyak mengalami kendala seperti dalam hal aspek permodalan, penyediaan benih, pupuk dan pestisida, dan saprodi, serta manajemen usaha, pemasaran komoditas hasil pertanian, dan terutama aspek teknologi di bidang pertanian yang dapat mendukung upaya peningkatan produktivitas. Oleh sebab itu dirasakan perlunya peran pemerintah melalui pelaksanaan fungsinya untuk dapat mendukung upaya-upaya peningkatan dan pengembangan usaha tani tersebut. Pemerintah melalui instansi terkait pada dasarnya bisa memberikan dukungan untuk membangun usaha tani melalui perencanaan program-program maupun kebijakan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi yang terdapat di berbagai daerah. Di samping itu, usaha tani yang salah satu bidangnya mengolah lahan pertanian untuk memproduksi berbagai komoditi pertanian bahan pangan sebagian masih dikelola secara tradisional, sehingga produktivitasnya relatif rendah. Padahal keberhasilan dan kelangsungan hidup suatu usaha tani banyak bergantung pada

produktivitasnya. Sedangkan untuk memperoleh produktivitas yang optimal dalam suatu usaha tani perlu didukung oleh teknologi pertanian yang tepat.

Dengan penggunaan teknologi yang tepat guna maka tanaman yang dibudidayakan tentunya akan lebih produktif dalam menghasilkan komoditi pertanian.

Untuk itu pihak pemerintah melalui kebijakan Kementerian Pertanian telah memfasilitasi suatu kegiatan pengkajian teknologi pertanian dengan membentuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di setiap wilayah propinsi, sebagaimana yang terdapat di Propinsi Riau. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau merupakan unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Provinsi Riau yang mempunyai tugas pokok seperti termuat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16/Permentan/OT.140/3/2006 Tanggal 1 Maret 2006, yaitu melaksanakan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, BPTP Riau mempunyai fungsi : (1) inventarisasi dan identifikasi kebutuhan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, (2) pengkajian dan perakitan teknologi pertanian, (3) penyiapan paket teknologi untuk penyuluhan pertanian, (4) pelayanan teknik kegiatan pengkajian, dan (5) pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga balai.

Pelayanan terhadap pengguna teknologi pertanian yang dilaksanakan BPTP di antaranya yaitu pengkajian teknologi tepat guna untuk kemudian diterapkan dalam aktivitas usaha pertanian masyarakat di suatu daerah. Dengan tersedianya teknologi tepat guna untuk budidaya berbagai jenis tanaman

pangan, maka diharapkan dapat merangsang peningkatan produktivitas usaha tani sekaligus meningkatkan pendapatan petani serta ketahanan pangan.

Pengkajian teknologi tepat guna yang telah dilakukan pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau pada dasarnya telah banyak membantu para petani untuk meningkatkan produktivitasnya. Adapun salah satu upaya yang telah dilakukan oleh pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau dalam rangka mengembangkan usaha tani di Propinsi Riau yaitu pembinaan Usaha Tani budidaya komoditas Tanaman Padi Sawah yang ada di Kabupaten Rokan Hulu. Keberhasilan upaya pembinaan Usaha Tani budidaya komoditas Tanaman Padi Sawah tersebut tentunya sangat diharapkan agar di masa mendatang bisa mendukung terwujudnya swasembada dan memperkuat ketahanan pangan khususnya di Propinsi Riau.

Masih tingginya ketergantungan pasokan bahan pangan dari daerah lain dan bahkan dari luar negeri, maka mendorong pemerintah untuk membangun sektor pertanian bahan pangan di Propinsi Riau. Adapun salah satu upaya yang telah dilaksanakan yaitu kegiatan Pengkajian teknologi tepat guna oleh pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau. Namun keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai tergantung pada kesuksesan setiap pegawai/karyawan melaksanakan tugas-tugasnya. Di samping itu untuk mencapai kinerja yang optimal, berbagai aktivitas pegawai seyogyanya dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Harus diakui, kelengkapan dan optimalnya fungsi setiap sarana/prasarana merupakan faktor yang sangat penting dalam mewujudkan kinerja aparat yang

bermutu tinggi, cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Khusus di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau, keterbatasan sarana/prasarana serta sumber daya manusia masih merupakan faktor penghambat yang utama terhadap pencapaian keberhasilan kinerjanya. Di samping itu, masih rendahnya dukungan partisipasi aktif masyarakat petani yang sekaligus sebagai sasaran kegiatan/program yang dilaksanakan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian turut mempengaruhi optimalisasi pencapaian keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai, khususnya dalam pelaksanaan kegiatan Pengkajian teknologi tepat guna oleh pihak BPTP Riau.

Pembinaan yang telah dilakukan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau, antara lain yaitu : (1) Pembinaan untuk penerapan teknologi inovasi bagi petani/ kelompok tani. Misalnya penggunaan varietas unggul baru tanaman padi, penerapan sistem tanam jajar legowo; (2) Pembinaan dalam bentuk memperluas informasi teknologi inovasi kepada para petugas pertanian di lapangan; dan (3) Pembinaan kepada pengguna teknologi lainnya (penggilingan padi, usaha sarana produksi, usaha jasa alat mesin pertanian, usaha pengolahan hasil pertanian, pedagang lokal dan pedagang agro-input)

Menurut Rivai (2006;188), organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya tidak dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Organisasi merupakan suatu unit terkoordinasi yang terdiri setidaknya dua orang, berfungsi mencapai satu sasaran tertentu atau serangkaian sasaran. Sedangkan organisasi pemerintah adalah organisasi bersifat formal. Struktur organisasinya pun formal. Begitu sebuah

organisasi formal terbentuk, di dalamnya secara spontan terbentuk pula organisasi informal. (Ndraha, 2003;248) Struktur formal yaitu struktur internal organisasi, sedangkan struktur informal yaitu merupakan hubungan sosial antar individu yang timbul secara spontan. Sedangkan birokrasi dimaksudkan sebagai satu sistem otorita yang ditetapkan secara rasional oleh berbagai aturan. Birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisasi, secara teratur, suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh orang banyak. (Santosa, 2009;2)

Menurut Barnard dalam Thoha (2003;114), unsur dari suatu organisasi antara lain :

1. Organisasi terdiri dari serangkaian kegiatan yang dicapai lewat suatu proses kesadaran, kesengajaan, dan koordinasi yang bersasaran.
2. Organisasi merupakan kumpulan dari orang-orang untuk melaksanakan kegiatan yang bersasaran tersebut.
3. Organisasi memerlukan adanya komunikasi, yakni suatu hasrat dari sebagian anggotanya untuk mengambil bagian pencapaian tujuan bersama anggota lainnya. Dalam hal ini Barnard menekankan peranan seseorang dalam organisasi, di antaranya ada sebagian anggota yang harus diberi informasi atau dimotivasi, dan sebagian lainnya yang harus membuat keputusan.

Untuk terwujudnya suatu organisasi yang baik, efektif, efisien serta sesuai dengan kebutuhan, menurut Hasibuan (2008;29) secara selektif harus didasarkan pada prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut :

- 1) Prinsip Tujuan Organisasi (*principle of organizational objective*)

- 2) Prinsip Kesatuan Tujuan Organisasi (*principle of unity of objective*)
- 3) Prinsip Kesatuan Perintah (*principle of unity of command*)
- 4) Prinsip Rentang Kendali (*principle of the span of management*)
- 5) Prinsip Pendelegasian Wewenang (*principle of delegation of authority*)
- 6) Prinsip Keseimbangan Wewenang dan Tanggungjawab (*principle of parity of authority and responsibility*)
- 7) Prinsip Tanggungjawab (*principle of responsibility*)
- 8) Prinsip Pembagian Kerja (*principle of division of work*)
- 9) Prinsip Penempatan Personalia (*principle of personnel placement*)
- 10) Prinsip Jenjang-berangakai (*principle of scalar chain*)
- 11) Prinsip Efisiensi (*principle efficiency*)
- 12) Prinsip Kesenambungan (*principle of continuity*)
- 13) Prinsip Koordinasi (*principle of coordination*)

Suatu organisasi yang berhasil dapat diukur dengan melihat pada sejauhmana organisasi tersebut dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Stoner (1982) menekankan pentingnya efektivitas organisasi dalam pencapaian tujuan-tujuan organisasi, dan efektivitas adalah kunci dari kesuksesan suatu organisasi. Efektivitas organisasi menunjuk pada tingkat jauh organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsinya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber-sumber yang ada. Ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas organisasi menyangkut dua aspek, yaitu :

(1) tujuan organisasi; (2) pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. (Tangkilisan, 2005;138-140)

Sedangkan menurut Steers dalam Tangkilisan (2005;142), efektivitas organisasi sebagai ukuran seberapa jauh sebuah organisasi bderhasil mencapai tujuan yang layak dicapai.

Efektivitas organisasi menurut Gibson *et.al* dalam Tangkilisan (2005;141),dapat diukur dari :

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai;
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan;
3. Proses analisis dan perumusan kebijaksanaan yang mantap;
4. Perencanaan yang matang;
5. Penyusunan program yang tepat;
6. Tersedianya sarana dan prasarana;
7. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.

Dalam pengertian efektivitas organisasi, tercakup pengertian kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan, program, atau misi) suatu organisasi, produktivitas organisasi, dan tidak adanya tekanan atau ketegangan di antara anggota organisasi. (Tangkilisan, 2005;138-143)

Fungsi adalah sejumlah kegiatan yang meliputi berbagai jenis pekerjaan yang dapat digolongkan dalam satu kelompok sehingga membentuk suatu kegiatan administratif. (Herujito, 2004;17) Sementara itu menurut The Liang Gie dalam Tangkilisan (2005;43), fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, atau pertimbangan lainnya. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk melaksanakan suatu usaha kerjasama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan pada

tanggung jawab seorang pejabat atau satuan organisasi.

Jadi dalam pengertian fungsi terkandung makna, hak, wewenang, dan kewajiban seseorang atau satuan badan organisasi tertentu. (Tangkilisan, 2005;43).

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pemilihan metode ini didasarkan atas pertimbangan bahwa dalam penelitian ini peneliti bermaksud menganalisis suatu variabel, yaitu mengenai fungsi BPTP dalam pembinaan usaha tani, berdasarkan data kualitatif yang ada yang diperoleh dari hasil penelitian.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara variabel satu dengan variabel lain. (Sugiyono, 2005;11)

Sedangkan yang dimaksud penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. (Moleong, 2013;6) Sebagai sumber data dalam penelitian ini digunakan informan.

Informan adalah orang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini maka informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya karena dipancing oleh pihak peneliti. Istilah

informan ini banyak digunakan dalam penelitian kualitatif (Arikunto, 2006;145)

Penentuan informan/ responden dilakukan dengan cara *purposive sampling*. Menurut Sugiyono (2005;11), *Sampling Purposive* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu dalam hal ini pertimbangan peneliti bahwa pihak atau individu yang bersangkutan dianggap memiliki kompetensi dan lebih memahami untuk dapat memberikan data yang diperlukan sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

Menurut Suyanto & Sutinah (2011;55), data kalau digolongkan menurut asal sumbernya dapat dibagi menjadi dua : (1) data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden); (2) data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari lembaga atau institusi tertentu.)

Adapun jenis dan sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah : Data Primer dan Data Sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik/ cara : Wawancara/ Interview, Observasi, dan Dokumentasi.

Analisis data ialah suatu kegiatan guna menelaah data yang telah dikumpulkan dalam penelitian. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis deskriptif kualitatif. Jadi, dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan cara mendeskripsikan mengenai pelaksanaan fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau dalam pembinaan usaha tani bagi Petani Sawah di Kabupaten Rokan Hulu, berdasarkan fakta dan data kualitatif yang bersumber dari hasil interview (wawancara), observasi dan dokumentasi, yang ditrianggulasikan (digabungkan), untuk

kemudian bisa menarik suatu kesimpulan hasil penelitian.

HASIL

• Pelaksanaan Fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau dalam Pembinaan Usaha Tani

BPTP Riau sebagaimana layaknya suatu organisasi yang mempunyai fungsi sebagaimana ditetapkan di dalam perundang-undangan, sudah selayaknya menjalankan fungsi tersebut secara optimal agar visi dan misi organisasi bisa diwujudkan. Untuk itu maka prinsip-prinsip organisasi sangat penting untuk diterapkan di dalam aktivitas organisasi. Karena efektivitas pelaksanaan fungsi organisasi dapat dipengaruhi oleh sejauhmana prinsip organisasi diwujudkan dalam mengelola organisasi tersebut.

Adapun prinsip-prinsip organisasi itu antara lain adalah : Prinsip Tujuan Organisasi (*principle of organizational objective*), Prinsip Rentang Kendali (*principle of the span of management*), Prinsip Pendelegasian Wewenang (*principle of delegation of authority*), Prinsip Pembagian Kerja (*principle of division of work*), Prinsip Efisiensi (*principle efficiency*), dan Prinsip Koordinasi (*principle of coordination*).

Sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini, maka penulis menganalisis prinsip-prinsip organisasi tersebut sebagai indikator analisis, dan membandingkannya dengan kenyataan pada objek penelitian, sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian dan dapat mengambil kesimpulan. Adapun uraian analisis terhadap masing-masing indikator dijabarkan sebagai berikut.

1. Prinsip Tujuan Organisasi (*principle of organizational objective*)

Prinsip tujuan organisasi merupakan suatu prinsip dasar yang terpenting dalam mengelola suatu organisasi, baik dalam organisasi privat yang berorientasi profit maupun pada organisasi birokrasi yang menyelenggarakan pelayanan publik, karena prinsip berkaitan erat dengan visi dan misi organisasi. Prinsip tujuan organisasi maksudnya adalah bahwa setiap organisasi harus memiliki tujuan yang jelas dan rasional.

Suatu organisasi yang tidak menyusun tujuan yang jelas dan rasional, maka pada akhirnya sasaran yang diinginkan dari setiap program/ kegiatan yang dilaksanakan sulit terwujud. Hal ini dikarenakan aktivitas organisasi dan jajarannya menjadi tidak terarah dan terpadu pada suatu tujuan yang mampu dicapai. Dalam hal ini pihak pengambil keputusan dalam suatu organisasi sangat berperan dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan tujuan yang ingin diwujudkan organisasi.

Demikian halnya sehubungan dengan pembinaan usaha tani oleh BPTP Riau yang telah dilaksanakan melalui program/ kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi, tujuan yang jelas dan rasional perlu ditetapkan agar sejauhmana keberhasilan program/ kegiatan tersebut dapat diketahui dan pencapaiannya dapat dilakukan secara terarah dan terpadu pula. Dari hasil analisis disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek prinsip tujuan organisasi, maka fungsi BPTP Riau dalam membina usaha tani di Kabupaten Rokan Hulu telah cukup efektif.

2. Prinsip Rentang Kendali *(principle of the span of management)*

Rentang kendali ialah lingkup tugas dan tanggung jawab yang diemban seseorang individu pemegang jabatan dalam organisasi atau sekelompok orang dalam suatu unit atau bagian/ departemen sebagaimana di atur dalam ketentuan perundang-undangan. Jadi, yang dimaksud prinsip rentang kendali dalam hal ini yaitu sejauhmana tugas dan tanggung jawab dari sumberdaya aparatur maupun bagian tugas atau departemen, sehubungan dengan pelaksanaan program/ kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dilaksanakan oleh pihak BPTP Riau di Kabupaten Rokan Hulu, dibandingkan dengan ketersediaan sumber daya aparatur serta dukungan sarana dan prasarana.

Prinsip rentang kendali mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan agar selalu memperhatikan kemampuan kerja sumber daya manusia, baik dari segi kualitas maupun kuantitasnya. Jika rentang kendali dari tugas dan tanggung jawab yang diemban, maka dikhawatirkan kurang maksimalnya efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Dengan begitu, setiap tugas dan tanggung jawab dapat terselesaikan secara optimal.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek rentang kendali maka fungsi BPTP Riau dalam membina usaha tani di Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup efektif.

3. Prinsip Pendelegasian Wewenang *(principle of delegation of authority)*

Prinsip pendelegasian wewenang juga merupakan aspek penting dalam pengelolaan suatu organisasi, karena banyak dan kompleksnya aktivitas dalam pelaksanaan tugas serta tanggung jawab yang diemban. Suatu organisasi kurang berfungsi optimal, apabila atasan tidak mendelegasikan wewenang secara maksimal kepada bawahan.

Pendelegasian wewenang yang dimaksud dalam hal ini yaitu sejauhmana pendelegasian kepada sumber daya aparatur pemegang jabatan maupun kepada unit tugas, dalam rangka pembinaan usaha tani melalui pelaksanaan program/ kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dilaksanakan oleh pihak BPTP Riau di Kabupaten Rokan Hulu, sehingga masing-masing sumber daya aparatur pemegang jabatan maupun kepada unit tugas mengetahui dengan jelas wewenangnya.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek pendelegasian wewenang, maka fungsi BPTP Riau dalam membina usaha tani di Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup efektif.

4. Prinsip Pembagian Kerja *(principle of division of work)*

Pembagian kerja sangat penting artinya untuk pencapaian keberhasilan dalam pengelolaan organisasi. Hal ini dikarenakan seorang pimpinan atau atasan tidak mungkin mengerjakan sendiri tugas-tugas dan pekerjaan yang ada dalam aktivitas organisasi. Di samping itu, pembagian kerja juga berguna agar bawahan atau pemegang jabatan bisa mengetahui dengan jelas yang menjadi lingkup bidang pekerjaan yang menjadi tanggung sehingga bisa

menghindari kebingungan serta kelalaian bawahan akan tugas dan tanggungnya.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek pembagian kerja, maka fungsi BPTP Riau dalam membina usaha tani di Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup efektif.

5. Prinsip Efisiensi (*principle efficiency*)

Setiap organisasi berupaya untuk mencapai tingkat efisiensi yang setinggi-tingginya, karena tingkat efisiensi tinggi berarti organisasi telah mampu mencapai kinerja yang baik. Efisiensi yang tinggi juga merupakan keunggulan kompetitif yang penting bagi organisasi untuk mendukung kemampuan bersaing, terlebih lagi dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis dan globalisasi yang semakin pesat saat ini.

Dengan tercapainya efisiensi yang tinggi berarti organisasi telah mampu mencapai tujuannya secara optimal dengan pengorbanan sumber daya, meliputi sumber daya manusia, sarana dan prasarana pendukung serta waktu yang seminimal mungkin. Dengan begitu, jelaslah bahwa setiap organisasi, baik organisasi yang bergerak di bidang bisnis maupun organisasi birokrasi pemerintahan dituntut untuk mampu meningkatkan efisiensinya.

Adapun prinsip efisiensi yang dimaksud disini yaitu sejauhmana instansi mampu memanfaatkan sumber daya yang ada dalam rangka pembinaan usaha tani melalui pelaksanaan program/kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dilaksanakan oleh pihak BPTP Riau.

Berdasarkan hasil analisis disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek

efisiensi organisasi, maka fungsi BPTP Riau dalam membina usaha tani di Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup efektif.

6. Prinsip Koordinasi (*principle of coordination*)

Pengkoordinasian perlu dilakukan ketika suatu organisasi menginginkan terwujudnya kinerja sumber daya aparatur maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Koordinasi berperan penting mengingat bahwa di satu sisi dari segi internal, organisasi terbentuk atas beberapa unit atau bagian tugas dimana terdapat sejumlah sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendukung yang perlu diarahkan dalam upaya pencapaian tujuan, sedangkan dari segi eksternal aktivitas organisasi juga bisa berkaitan dengan organisasi atau instansi lainnya. Suatu organisasi yang terkoordinir dengan baik pada akhirnya kurang berkinerja baik dan kurang berhasil tujuan.

Prinsip koordinasi yang dimaksudnya disini yaitu sejauhmana sumber daya aparatur serta sarana dan prasarana pendukung yang tersedia mampu diintegrasikan dan disinkronkan agar terarah semata-mata pada pencapaian tujuan yang diinginkan, dalam rangka pembinaan usaha tani melalui pelaksanaan program/kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dilaksanakan oleh pihak BPTP Riau.

Adapun pengkoordinasian yang dilakukan rangka pelaksanaan program/kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat

guna spesifik lokasi yang dilaksanakan oleh pihak BPTP Riau, yaitu : untuk meneliti, mengkaji dan merakit teknologi inovasi dilakukan oleh tim peneliti yang ahli di bidangnya masing-masing. Hasil-hasil penelitian/ pengkajian diujicobakan pada pertanian percontohan di lapangan. Pada saat itu pengawalan teknologi dilakukan secara intensif oleh detaser BPTP atas dasar pembinaan dan pengarahan dari peneliti BPTP. Apabila teknologi yang diujicobakan sesuai dan adaptif secara teknis, sosial dan ekonomi, maka dilakukan gelar teknologi oleh penyuluh BPTP untuk mempercepat diseminasi informasi teknologi bersama-sama dengan PPL. (*Wawancara dengan Kepala BPTP Riau, tanggal 18 Juli 2014*)

Dari uraian di atas diketahui bahwa pada umumnya koordinasi yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan usaha tani melalui pelaksanaan program/ kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dilaksanakan oleh pihak BPTP Riau cukup baik. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ditinjau dari aspek koordinasi organisasi, maka fungsi BPTP Riau dalam membina usaha tani di Kabupaten Rokan Hulu sudah cukup efektif.

- **Faktor-faktor penghambat dan Pendukung pada Pelaksanaan fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau dalam Pembinaan Usaha Tani**

Setiap organisasi dalam menjalankan fungsinya pada umumnya tidak luput dari permasalahan yang bisa menghambat yang mana jika tidak diatasi secara tuntas bisa mempengaruhi pencapaian tujuan. Faktor penghambat

bisa ditimbulkan akibat kegagalan pimpinan dalam membina internal organisasinya yang meliputi pengelolaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana yang ada. Di samping itu faktor penghambat juga bisa diakibatkan pengaruh lingkungan eksternal organisasi.

Pada setiap aktivitas organisasi, faktor penghambat bisa mempengaruhi kinerja sumber daya manusia secara individu maupun kinerja organisasi secara keseluruhan. Demikian halnya pada pembinaan usaha tani melalui program pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi bagi para Petani yang dilaksanakan oleh BPTP Riau di Kabupaten Rokan Hulu tersebut.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi BPTP Riau dalam melaksanakan pembinaan usaha tani melalui program pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi bagi para Petani, antara lain adalah : (a) Koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah setempat kurang optimal karena dukungan anggaran daerah yang terbatas dalam penyediaan dan perluasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menerapkan teknologi dalam skala luas; (b) Adanya perubahan iklim secara ekstrim (kekeringan dan banjir); (c) Sebagian kelompok tani kurang dinamis dalam aktivitas kelompok; (d) Terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang ada di BPTP, baik sebagai tenaga peneliti maupun tenaga penyuluh lapangan serta tenaga pendukung lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program.

Sementara itu faktor pendukung yang ada dalam pembinaan usaha tani melalui program pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian

tepat guna spesifik lokasi bagi para Petani yang dilaksanakan oleh BPTP Riau, antara lain yaitu: (a) Teknologi yang diintroduksi kepada petani mudah dilaksanakan. Di samping itu teknologi informasinya mudah didapatkan, menguntungkan dan dapat diterapkan dalam hamparan yang luas; (b) Partisipasi dari para petani relatif cukup baik untuk bekerjasama dalam mensukseskan program yang dilaksanakan dan menerima teknologi yang diintroduksi; dan (c) Adanya dukungan pemerintah daerah setempat dalam upaya perluasan penerapan teknologi di tingkat petani.

PEMBAHASAN

Setiap instansi dan lembaga-lembaga pemerintah pada dasarnya didirikan untuk menyelenggarakan suatu fungsi tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi merupakan sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifatnya, atau pertimbangan lainnya, dan untuk melaksanakan suatu usaha kejasama, aktivitas-aktivitas yang sama jenisnya itu biasanya digabung menjadi satu kesatuan dan diserahkan pada tanggung jawab seorang pejabat atau satuan organisasi.

Instansi dan lembaga-lembaga pemerintah yang didirikan sebagai suatu organisasi birokrasi publik mengemban fungsi pokok, yaitu fungsi regulasi, pemberdayaan, dan pelayanan publik. Fungsi regulasi diterapkan dalam merumuskan dan menyusun kebijakan dalam bentuk suatu perundang-undangan. Fungsi pemberdayaan dilaksanakan dalam upaya membangun masyarakat yang makmur dan sejahtera. Sementara fungsi pelayanan publik diselenggarakan

dalam upaya pemenuhan barang dan jasa publik.

Sehubungan dengan tujuan untuk mendukung ketahanan pangan, pemerintah melalui kementerian terkait telah berupaya meningkatkan produktivitas hasil pertanian rakyat. Dalam hal ini pemerintah telah berupaya memberdayakan usaha tani yang dikelola masyarakat, diantaranya dengan memperkenalkan dan menerapkan teknologi inovasi. Dengan begitu, maka produktivitas hasil pertanian dan kesejahteraan para petani bisa meningkat.

Adapun salah satu organisasi birokrasi atau instansi yang dibentuk untuk mendukung pengembangan dan penerapan teknologi di bidang pertanian yaitu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP). Balai tersebut merupakan instansi yang dibentuk di bawah kementerian Pertanian. Pihak pemerintah melalui kebijakan Kementerian Pertanian telah memfasilitasi program/ kegiatan pengkajian teknologi pertanian dengan membentuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) di setiap wilayah propinsi, sebagaimana yang ada di Propinsi Riau. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau merupakan unit pelaksana teknis Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Provinsi Riau.

Sesuai dengan fungsinya, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau telah melaksanakan program/ kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi. Hal ini diharapkan dapat membina dan mengembangkan usaha tani rakyat yang meliputi berbagai komoditas hasil pertanian. Adapun program/ kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dilaksanakan antara lain yakni pembinaan

usaha tani pada Petani Komoditas Tanaman Padi Sawah di Kabupaten Rokan Hulu.

Pembinaan usaha tani merupakan suatu proses, cara, dan perbuatan untuk membina dan mengembangkan usaha tani masyarakat, agar terwujud pembaharuan; penyempurnaan; usaha, tindakan, dan kegiatan yg dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik dalam pengelolaan usaha melalui budidaya tanaman. Program / kegiatan pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi yang dilakukan oleh pihak BPTP Riau diharapkan dapat mengembangkan panca usaha tani bagi masyarakat Petani Tanaman Padi Sawah di daerah tersebut. Dengan adanya program tersebut maka diharapkan dapat menunjang peningkatan produktivitas usaha tani masyarakat setempat pada umumnya, dan petani tanaman padi pada khususnya.

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau dalam Pembinaan Usaha Tani telah terlaksana secara efektif. Hal ini dikarenakan adanya penetapan tujuan yang jelas, lingkup tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan kerja serta ketersediaan sumber daya manusia, pendelegasian wewenang dan pembagian kerja yang jelas serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan adanya pengkoordinasian yang baik terhadap tugas dan bawahan.

Adapun faktor penghambat yang dihadapi BPTP Riau dalam melaksanakan pembinaan usaha tani melalui program pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi bagi para Petani, antara lain adalah : (a) koordinasi dan sinkronisasi program dengan

pemerintah daerah setempat kurang optimal karena dukungan anggaran daerah yang terbatas dalam penyediaan dan perluasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menerapkan teknologi dalam skala luas; (b) adanya perubahan iklim secara ekstrim (kekeringan dan banjir); (c) sebagian kelompok tani kurang dinamis dalam aktivitas kelompok; dan (d) masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang ada di BPTP, baik sebagai tenaga peneliti maupun tenaga penyuluh lapangan serta tenaga pendukung lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program. Sementara terdapat faktor pendukung dalam melaksanakan pembinaan usaha tani melalui program pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi bagi pada Petani tersebut, antara lain yaitu : (a) Teknologi yang diintroduksikan kepada petani mudah dilaksanakan, dan di samping itu teknologi informasinya mudah didapatkan, menguntungkan dan dapat diterapkan dalam hamparan yang luas; (b) partisipasi dari para petani relatif cukup baik untuk bekerjasama dalam mensukseskan program yang dilaksanakan dan menerima teknologi yang diintroduksikan; dan (c) adanya dukungan pemerintah daerah setempat dalam upaya perluasan penerapan teknologi di tingkat petani.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penulis dapat mengambil kesimpulan hasil penelitian sebagai berikut :

1. Fungsi Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Riau dalam Pembinaan Usaha Tani telah

terlaksana secara efektif. Hal ini dikarenakan adanya penetapan tujuan yang jelas, lingkup tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuan kerja serta ketersediaan sumber daya manusia, pendelegasian wewenang dan pembagian kerja yang jelas serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, dan adanya pengkoordinasian yang baik terhadap tugas dan bawahan.

2. a. Faktor penghambat yang dihadapi BPTP Riau dalam melaksanakan pembinaan usaha tani melalui program pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi bagi para Petani, antara lain adalah :
 - 1) Koordinasi dan sinkronisasi program dengan pemerintah daerah setempat kurang optimal karena dukungan anggaran daerah yang terbatas dalam penyediaan dan perluasan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menerapkan teknologi dalam skala luas;
 - 2) Adanya perubahan iklim secara ekstrim (kekeringan dan banjir);
 - 3) Sebagian kelompok tani kurang dinamis dalam aktivitas kelompok; dan
 - 4) Masih terbatasnya ketersediaan sumber daya manusia yang ada di BPTP, baik sebagai tenaga peneliti maupun tenaga penyuluh lapangan serta tenaga pendukung lainnya yang berhubungan dengan pelaksanaan program.
- b. Faktor pendukung bagi BPTP Riau dalam melaksanakan

pembinaan usaha tani melalui program pengkajian, perakitan dan pengembangan teknologi pertanian tepat guna spesifik lokasi bagi para Petani, antara lain adalah :

- 1) Teknologi yang diintroduksi kepada petani mudah dilaksanakan, dan di samping itu teknologi informasinya mudah didapatkan, menguntungkan dan dapat diterapkan dalam hamparan yang luas;
- 2) Partisipasi dari para petani relatif cukup baik untuk bekerjasama dalam mensukseskan program yang dilaksanakan dan menerima teknologi yang diintroduksi; dan
- 3) Adanya dukungan pemerintah daerah setempat dalam upaya perluasan penerapan teknologi di tingkat petani.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R., 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Arikunto, S., 2006. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Black, James A. & Dean J. Champion, 2009. *Metode dan Masalah Penelitian Sosial*, Terjemahan E. Koswara, dkk., Bandung : Refika Aditama.

- Hasibuan, Malayu, 2008. *Organisasi & Motivasi: Dasar Peningkatan Produktivitas*, Cetakan Keenam, Jakarta : Bumi Aksara.
- Herujito, Yayat M., 2004. *Dasar-dasar Manajemen*, Jakarta : Grasindo.
- Ibrahim, A., 2009. *Pokok-pokok Administrasi Publik & Implementasinya*, Cetakan Kedua, Bandung : Refika Aditama.
- Kuncoro, M., 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Jakarta : Erlangga.
- Moleong, Lexy J., 2013. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Taliziduhu, 2003. *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jilid I, Cetakan Pertama, Jakarta : Rineka Cipta.
- Nugroho, R., 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, H., 2008. *Teori Administrasi Publik*, Bandung : Alfabeta.
- Rivai, Veithzal, 2006. *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Edisi 2, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Santosa, Pandji, 2009. *Administrasi Publik – Teori dan Aplikasi Good Governance*, Cetakan Kedua, Bandung : Refika Aditama.
- Siagian, Sondang P., 2001. *Kerangka Dasar Ilmu Administrasi*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P., 2008. *Administrasi Pembangunan : Konsep, Dimensi, dan Strateginya*, Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono, 2005. *Metode Penelitian Administrasi*, Edisi ke-12, Bandung : Alfabeta.
- Suharto, E, 2006. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, Cetakan Kedua, Bandung : Refika Aditama.
- Suyanto, B. & Sutinah, 2011. *Metode Penelitian Sosial, Berbagai Alternatif Pendekatan*, Edisi Revisi, Jakarta : Kencana.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S., 2005. *Manajemen Publik*, Jakarta : Grasindo.
- Thoha, M., 2003. *Perilaku Organisasi : Konsep Dasar dan Aplikasinya*, Edisi 1, Jakarta : RajaGrafindo Persada.
- Sumber Lainnya :**
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 Tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Dan Kehutanan.
- Peraturan Menteri Pertanian RI No. 16/Permentan/OT.140/3/ 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian.
- Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 273/Kpts/Ot.160/4/2007 tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Petani.
- Laporan Tahunan BPTP Riau, Tahun 2013.
- Laporan Akhir, Model Pengembangan Pertanian Perdesaan Melalui Inovasi (M-P3MI) Di Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011, BPTP Riau, Pekanbaru, 2011.
- LAKIP BPTP Riau, Tahun 2013.
- Soeharjo (1973) : <http://sriwijaya1012.wordpress.com/2012/07/19/usahatani-faktor-internal-yang-mempengaruhi-keberhasilan-usahatani/>
- <http://epetani.pertanian.go.id/blog/pembi-naan-berkelanjutan-sebuah-upaya->

penguatan-kelembagaan-
kelompok-tani-yang-mandiri

[http://www.kamusbesar.com
/22059/pelaksanaan](http://www.kamusbesar.com/22059/pelaksanaan)
<http://kbbi.web.id/implementasi>